



Kerja Sama UNICEF dengan Indonesia dalam Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua sebagai Tujuan Dua MDGs

Ellissa Priyanka

Alumni Prodi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: ellissa16001@mail.unpad.ac.id

Dudy Heryadi

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: dudy.heryadi@unpad.ac.id

| Dikirim: 9 Februari 2020

| Direvisi: 20 Mei 2020

| Diterima: 25 Mei 2020

| Dipublikasikan: 31 Mei 2020

Keywords

Indonesia, International Cooperation, The Second Goal of Millenium Development Goals, UNICEF.

ABSTRACT

This reseach aims to describe how UNICEF and Indonesia work together in achieving basic education for all as the two MDGs' goals. In explaining this phenomenon, Zartman & Touval's theory of international cooperation is used which refers to cooperation as a situation where actors in the international system agree to work together in order to produce something that cannot be achieved if done alone for their own interests. This research is also supported by Weiss & Wilkinson's theory of international organizations that suggests the importance of the presence of international organizations in creating conditions of cooperation and mutual welfare benefits to identify and solve problems through the design of certain solutions and persuade others to accept them. This research is conducted with a descriptive qualitative analysis research method. The data used in this research are obtained through literature study and interviews with related parties.

The results of this research indicate that the collaboration between UNICEF and Indonesia has had a positive impact in achieving the second goals of MDGs in Indonesia, namely basic education for all based on the increasing number of children returning to school and an indicator of educational achievement every year through advocacy carried out by UNICEF to the Indonesian government .

Kata Kunci

Indonesia, Kerja Sama Internasional, Tujuan Dua Millenium Development Goals, UNICEF.

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan kerja sama UNICEF dan Indonesia dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs. Dalam menjelaskan fenomena ini, digunakan teori kerja sama internasional milik Zartman & Touval yang menyebut kerja sama sebagai situasi dimana para aktor dalam sistem internasional sepakat untuk melakukan kerja bersama agar dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dicapai apabila dilakukan sendiri demi kepentingannya. Riset ini juga didukung dengan teori organisasi internasional milik Weiss & Wilkinson yang mengemukakan tentang pentingnya kehadiran organisasi internasional dalam

menciptakan kondisi kerja sama dan keuntungan kesejahteraan bersama guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah melalui rancangan solusi tertentu dan membujuk orang lain untuk menerimanya. Riset ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam riset ini diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa kerja sama UNICEF dengan Indonesia berhasil menyekolahkan kembali 17.000 anak usia sekolah dan meningkatkan angka indikator pencapaian pendidikan dasar setiap tahunnya melalui advokasi yang dilakukan UNICEF kepada pemerintah Indonesia.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hidup manusia agar dapat berkontribusi secara menyeluruh dalam rangkaian pembangunan nasional dapat dilakukan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan. Sebagai indikator penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan perlu dipromosikan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk merasakan pendidikan dan meningkatkan jumlah serta kualitas sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang kegiatan pendidikan.

Melihat peranannya yang cukup penting dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan, mendorong negara-negara di dunia untuk memasukkan pendidikan ke dalam kerangka awal agenda pembangunan global, yakni *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai poin kedua dengan tujuan mencapai pendidikan dasar untuk semua dan target utama (2A) menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Sebagai sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, di New York, MDGs memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui 8 visi pembangunan yang mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia guna mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan hingga mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi angka kematian anak pada 2015. Delapan visi tersebut, antara lain (UN, 2000):

1. *Eradicate Extreme Poverty and Hunger* (Mengurangi Kemiskinan dan Kelaparan)
2. *Achieve Universal Primary Education* (Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua)
3. *Promote Gender Equality and Empower Women* (Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)
4. *Reduce Child Mortality* (Menurunkan Angka Kematian Anak)
5. *Improve Maternal Health* (Meningkatkan Kesehatan Ibu)
6. *Combat HIV/AIDS, Malaria, and Other Diseases* (Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya)
7. *Ensure Environmental Sustain-ability* (Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup)
8. *Global Partnership for Development* (Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan)

Setiap tujuan yang tercantum dalam 8 susunan tujuan tersebut memiliki indikator target berstandar global yang kemudian disesuaikan dengan kondisi nasional negara target MDGs. Indikator target ini dalam praktiknya digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam memonitor segala jenis program pembangunan yang dilaksanakan di negara mereka, sekaligus menjadi tolak ukur pembangunan suatu negara yang berdasarkan MDGs.

Meskipun MDGs ditujukan untuk seluruh umat manusia, enam dari tujuan utamanya memiliki keterkaitan langsung dengan anak-anak. Setiap anak dilahirkan dengan hak untuk bertahan hidup, mendapatkan makanan dan gizi, kesehatan dan tempat tinggal, pendidikan, kesetaraan, partisipasi, dan perlindungan.

Membantu anak-anak meraih potensi maksimal mereka berarti berinvestasi dalam kemajuan umat manusia. Berinvestasi pada anak-anak juga berarti membantu pencapaian tujuan pembangunan yang lebih cepat karena anak-anak merupakan persentase sebagian besar dari kaum miskin dunia. Oleh karena itu, MDGs harus dipenuhi agar hak asasi manusia dasar bagi anak dapat direalisasikan.

Pada 2010, Indonesia mulai secara serius menginternalisasi MDGs ke dalam program-program nasional meskipun komitmen utama telah disepakati sejak 2000. Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan setiap target yang tercantum dalam agenda pembangunan global tersebut, khususnya dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target utama menjamin semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar pada 2015.

Oleh sebab itu, pemerintah menjadikan MDGs sebagai acuan utama dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 dan 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Bappenas, 2013: 1).

Untuk mempercepat pencapaian target dan tujuan MDGs, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang secara khusus berkaitan dengan pencapaian tujuan MDGs. Berdasarkan instruksi tersebut, pemerintah di tingkat pusat menyusun Peta Jalan Percepatan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Indonesia antara 2010-2015 dan sebanyak 33 Rencana Aksi Daerah (RAD) turut disusun oleh pemerintah di tingkat daerah (Bappenas, 2013: 2).

Pentingnya peran pendidikan yang tergambar ke dalam tujuan dua MDGs tersebut membuat pemerintah Indonesia pada 1994 memaklumkan wajib belajar pendidikan dasar, yang mencakup pendidikan pada tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs bagi anak-anak Indonesia usia 7-15 tahun sebagai bentuk dari perwujudan komitmen dalam memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga negara Indonesia.

Sejak pertama kali disetujui sebagai komitmen bersama dan menjadi laporan tahunan sejak 2004, pencapaian pendidikan dasar untuk semua di Indonesia sebagai tujuan dua MDGs diukur menggunakan tiga indikator utama, yaitu (i) APM/SD MI; (ii) proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan SD/MI/setara; dan (iii) angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun (Bappenas, 2010: 37).

Berdasarkan data laporan pencapaian MDGs Indonesia oleh Bappenas pada 2010, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tingkat nasional mengalami peningkatan menjadi 95,23 persen dari 88,70 persen pada 1992. Fenomena *Early Entry* SD/MI menjadi alasan mengapa Indonesia sulit mencapai angka 100 persen pada indikator ini. *Early Entry* adalah sebuah fenomena di mana anak-anak yang belum berusia 7 tahun (5-6 tahun) sudah bersekolah di SD/MI sehingga sebagian anak berusia 10-11 tahun sudah bersekolah di SMP/MTs. Meskipun angka ketercapaian utuh adalah 100 persen, namun ada alasan untuk melaporkan bahwa target MDGs pada indikator ini sudah memasuki pencapaian yang baik.

Sementara itu, disparitas partisipasi pendidikan antar-provinsi pada jenjang SD/MI sejak 2010 sudah semakin sempit. Hampir seluruh provinsi telah mencapai APM SD/MI di atas 90 persen. Namun demikian, Papua masih menjadi provinsi yang baru mencapai

angka 76,09 persen. Hal ini terjadi karena sejumlah masalah yang ada di pulau bagian timur Indonesia tersebut. Kurangnya penempatan guru dikarenakan ketiadaan fasilitas sosial dan keamanan yang mendukung membuat guru menjadi tidak berminat untuk menetap di wilayah timur Indonesia tersebut.

Selain itu, jarak tempuh dari rumah ke gedung sekolah yang cukup jauh, lokasi geografis tempat tinggal setiap anak yang berbeda, para anak usia sekolah yang sudah dipekerjakan untuk membantu ekonomi keluarga, dan kurangnya fasilitas sekolah di daerah pedesaan, terutama pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menjadi salah satu penyebab tingginya disparitas pendidikan.

Sepanjang periode 1992-2009, AMH penduduk usia 15-24 tahun meningkat dari 96,70 persen menjadi 99,47 persen. Partisipasi pada jenjang pendidikan dasar telah mendorong kemampuan penduduk dalam kemampuan beraksara. Selain itu, meningkatnya proporsi siswa kelas I SD/MI yang berhasil menyelesaikan sekolah hingga kelas 5 dan atau menamatkan sekolah dasar juga menyebabkan adanya peningkatan pada presentase penduduk melek huruf.

Kesenjangan antar-provinsi dalam kemampuan beraksara di tingkat wilayah di Indonesia sepanjang periode 1992-2010 tercatat hampir tidak ditemukan. Hampir semua provinsi di Indonesia telah mendekati sasaran 100 persen, kecuali provinsi Papua yang baru mencapai angka 79,69 persen. Meskipun dengan capaian angka tersebut, masih terdapat sekitar 0,5 persen penduduk usia 15-24 tahun yang buta aksara, yang umumnya adalah penduduk perempuan, tidak mampu, dan tinggal di wilayah 3T.

UNICEF sebagai lembaga PBB yang bergerak di bidang *humanitarian organization*, yang mana segala bentuk kegiatan yang dilakukannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, khususnya di negara-negara yang masih memerlukan dukungan dari lembaga PBB, termasuk

Indonesia, memiliki mandat yang kuat terhadap ibu dan anak. Berbicara mengenai anak, UNICEF merujuk pada *Convention on the Rights of the Child* atau CRC yang merupakan salah satu basis utama *framework* kerja UNICEF, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak-hak individu yang harus dipenuhi, salah satunya adalah hak untuk mendapat pendidikan.

Tugas UNICEF berikutnya adalah untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan mereka serta memastikan bagaimana agar setiap anak dapat memperoleh haknya tersebut. Bersama dengan badan-badan PBB lain dan sejumlah mitra global, UNICEF telah mengambil MDGs sebagai bagian dari mandatnya. Setiap tindakan yang dilakukan UNICEF adalah langkah maju menuju pencapaian MDGs (UNICEF – MDGs, n.d.)

UNICEF hadir di Indonesia dengan program tingkat tinggi pada karyanya di bidang perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan kebersihan, air, dan sanitasi melalui dukungan praktis terhadap perencanaan, pembiayaan, dan pemberian layanan, terutama untuk mengadvokasi kualitas, kesetaraan, dan keberlanjutan di daerah-daerah yang memiliki layanan kesenjangan yang besar. Kehadiran UNICEF memiliki pengaruh yang besar terhadap lebih dari 80 juta anak Indonesia (UNICEF – What We Do, n.d.).

Oleh karena itu, sebagai negara dengan populasi anak terbesar keempat di dunia menurut data UNICEF, UNICEF berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dasar untuk kehidupan yang lebih layak. UNICEF dan Indonesia saling bekerja sama dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs. Hal ini membuat periset tertarik dalam melakukan riset lebih lanjut mengenai kerja sama UNICEF dengan Indonesia dalam mencapai

pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs.

Adapun tujuan riset ini adalah untuk mendeskripsikan kerja sama UNICEF dengan Indonesia dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs. Riset ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penstudi HI mengenai kerja sama UNICEF dengan Indonesia dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs. Praktisnya, riset ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau bahan penunjang bagi penstudi lain dengan topik yang sama untuk melanjutkan dan menyempurnakan riset ini dikemudian hari.

Dalam melakukan riset ini, periset merujuk pada beberapa riset terdahulu yang memiliki bahasan serupa yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding dan penjelas. Riset-riset terdahulu tersebut antara lain *Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di India Periode Tahun 2010-2012* oleh Nurhayati Inayatul Maula mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Riset ini menganalisa efektifitas peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di India pada periode yang telah ditentukan serta melihat peluang dan tantangan yang dihadapi UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di India. Periset menemukan bahwa pada 2007, India menjadi negara dengan angka pernikahan anak terbesar ke dua di dunia. Oleh sebab itu, pemerintah India membuat kebijakan untuk menangani kasus tersebut. Dalam usaha menetapkan kebijakan yang dibuat tersebut, pemerintah India bekerjasama dengan UNICEF dalam menangani tingginya angka pada kasus pernikahan anak tersebut.

Selanjutnya, *Peran UNICEF dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Papua Tahun 2010-2015* oleh Septin Mei Sintayati mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Riset ini bertujuan untuk mengetahui peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam membantu masalah pendidikan bagi anak-anak di Papua. Penelitian ini menjelaskan

bagaimana UNICEF meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak di Papua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNICEF melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua melalui pembangunan gedung sekolah di banyak desa dan distribusi guru untuk mengajar di sekolah mereka.

Riset berikutnya adalah *Peran UNICEF dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Perdagangan Anak Menggunakan Konsep Keamanan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2012* oleh Diajeng Azaria mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Lampung. Riset ini membahas tentang UNICEF sebagai lembaga PBB yang bertugas untuk mendistribusikan bantuan kepada anak-anak dalam lingkup internasional. Keberadaan UNICEF di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian terkait permasalahan anak dan pemenuhan hak anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan UNICEF dalam pemenuhan hak anak korban perdagangan anak. Hasil dari penelitian ini adalah upaya UNICEF dalam memenuhi hak anak korban perdagangan anak menggunakan cara penyebaran informasi, pembangunan sarana dan konsultasi, pendampingan hukum dan peran operasional. Peran UNICEF diwujudkan melalui pendekatan fungsi operasional yang merupakan bagian dari fungsi organisasi internasional untuk mewujudkan alokasi bantuan secara nyata, dimana bantuan tersebut dapat berupa dukungan teknis, program, ataupun anggaran dana.

Kemudian adalah *Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia* oleh Nori Oktadewi dan Khairiyah mahasiswa pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia melalui Program Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Anak Penelitian ini dan faktor apa yang mempengaruhi perdagangan anak di

Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan perdagangan anak di Indonesia yang masih tinggi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pemerintah daerah, badan keamanan, geografis, lembaga hukum dan masyarakat.

Indonesia baru mulai secara serius mengadaptasi MDGs ke dalam program kebijakan nasional pada 2010. Berdasarkan data laporan pencapaian MDGs Indonesia oleh Bappenas di tahun yang sama, tiga indikator utama pendidikan dasar di Indonesia, yakni; (i) APM/SD MI; (ii) proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan SD/MI/setara; dan (iii) angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, selalu berada di atas angka rata-rata 90 persen. Meskipun angka ketercapaian pendidikan dasar menggunakan tiga indikator utama tersebut telah memasuki angka yang terbilang baik, namun usaha yang dilakukan belum mampu membawa Indonesia pada angka ketercapaian utuh, yakni 100 persen.

Disparitas partisipasi pendidikan dasar pada jenjang SD/MI antar-provinsi, khususnya di wilayah Papua tercatat masih terbilang cukup besar. Sejumlah tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana dalam mencapai pendidikan dasar pun masih ada dan perlu mendapat perhatian. Selain itu, masih terdapat sekitar 0,5 persen penduduk usia 15-24 tahun yang buta aksara, yang umumnya adalah penduduk perempuan, tidak mampu, dan tinggal di wilayah 3T. Kehadiran UNICEF di Indonesia lantas menjadi ruang untuk kerja sama di antara kedua entitas dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada guna mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs.

KERANGKA KONSEPTUAL

UNICEF berkomitmen untuk memastikan anak-anak dan remaja Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dasar dan bagaimana agar setiap anak dapat memperolehnya untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Kerangka pemikiran riset ini

berakhir pada kerja sama antara UNICEF dengan Indonesia dalam mensukseskan pencapaian tujuan dua MDGs, yakni mencapai pendidikan dasar untuk semua.

Dalam menjelaskan fenomena ini, digunakan teori kerja sama internasional milik Zartman & Touval yang menyebut kerja sama sebagai situasi dimana para aktor dalam sistem internasional sepakat untuk melakukan kerja bersama agar dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dicapai apabila dilakukan sendiri demi kepentingannya. Kerja sama dapat mengacu pada dua hal, yakni strategi aktor dalam menyelesaikan masalah-masalah spesifik dan pola interaksi atau hubungan antar aktor dengan keinginan untuk mempertahankan dan membina interaksi yang ada melalui pemecahan masalah secara bersama. Timbal balik menjadi kunci utama dalam kerja sama, dimana perilaku pengembalian yang sesuai dan menguntungkan di masa depan menjadi jaminannya (Zartman and Touval, 2010: 2-7).

Selain itu, riset ini juga dilandasi oleh teori organisasi internasional milik Weiss & Wilkinson yang mengemukakan tentang pentingnya kehadiran organisasi internasional dalam menciptakan kondisi kerja sama dan keuntungan kesejahteraan bersama guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah melalui rancangan solusi tertentu dan membujuk orang lain untuk menerimanya. Dalam literturnya, negara teridentifikasi memiliki dua alasan utama dalam mengapa mereka menciptakan OI. Pertama, untuk membantu menstabilkan tatanan internasional dan serangkaian pengaturan politik. Kedua, untuk meningkatkan prospek kerja sama, mengatasi masalah yang terkait dengan pilihan kolektif, dan meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif (Weiss & Wilkinson, 2014: 49).

Dengan kata lain, negara membutuhkan kehadiran organisasi internasional untuk menciptakan kondisi kerja sama dan keuntungan kesejahteraan bersama. Oleh Clive Archer, organisasi internasional terbagi ke

dalam 9 fungsi poin, yang salah satunya adalah fungsi operasional atau pelaksanaan. Organisasi internasional yang berfungsi sebagai pelaksanaan dapat dilakukan melalui alokasi bantuan secara nyata yang ditemukan beragam bentuk, seperti pelayanan bantuan, pelayanan pengungsi, pelayanan teknis, atau yang berkaitan dengan dana dan komoditi (Archer, 2001: 107-108).

Sejauh yang berkaitan dengan isu pendidikan dasar dan anak, UNICEF merupakan aktor *International Governmental Organization* yang memiliki fungsi operasional dalam memberikan bantuan dan pelayanan di bidang tersebut.

Berkenaan dengan pembangunan nasional, riset ini didukung didukung oleh Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen sebagai salah satu teori pembangunan. Gagasan utama Pendekatan Kapabilitas adalah kesejahteraan manusia sebagai tujuan pembangunan dan peran sentralnya sebagai agen perubahan. Sen menekankan pendidikan sebagai salah satu kemampuan penting manusia guna mencapai kesejahteraannya dalam pembangunan (Fukuda-Parr, 2011: 123).

Alan Thomas mendefinisikan pembangunan ke dalam tiga konsep utama. Konseptualisasi pertama mendefinisikan pembangunan sebagai sebuah proses perubahan sosial struktural (Thomas, 2004, dalam Sumner & Tribe, 2008: 12). Dalam konteks ini, pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan negara-negara akibat pertumbuhan ekonomi dan perubahan masyarakat yang terjadi dari waktu ke waktu. Perspektif ini memang tidak selalu berhubungan dengan perubahan yang 'baik' atau disengaja karena dalam beberapa kasus pembangunan juga disertai dengan kemunduran, krisis, dan hal-hal problematis lainnya.

Konseptualisasi kedua mencirikan pembangunan sebagai suatu visi atau ukuran perubahan progresif yang dihubungkan dengan indikator kinerja (Sumner & Tribe, 2008: 13). Perspektif ini dianggap terlalu teknis dan lebih sempit dalam definisi. Pada level mendasar,

konsep tersebut hanya berkaitan dengan pembangunan yang terjadi dalam serangkaian indikator kinerja jangka pendek hingga menengah yang dapat diukur dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, seperti perubahan dalam kemiskinan atau tingkat pendapatan.

Konseptualisasi ketiga menyatakan pembangunan terdiri dari perubahan dan hasil 'buruk' melalui penerapan konsep etnosentris Barat mengenai pembangunan di negara Dunia Ketiga. Perspektif ketiga muncul sebagai reaksi terhadap upaya yang disengaja pada kemajuan yang dibuat atas nama pembangunan sejak Perang Dunia II dan dipicu oleh Deklarasi 1949 oleh Presiden Truman (Sumner & Tribe, 2008: 14).

METODE RISET

Periset menggunakan metode riset kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data dan informasi secara lengkap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan mengenai kerja sama UNICEF dengan Indonesia dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs.

Riset ini menggunakan teknik pengumpulan literatur terkait dan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data. Proses riset kualitatif ditunjang dengan literatur terkait yang periset dapatkan melalui dokumen seperti jurnal, buku, koran, laporan resmi, notulensi rapat, dan surat (Creswell, 2010; hal 230-232).

Teknik wawancara dipilih periset guna mendapatkan data yang eksklusif dan valid. Wawancara dapat dilakukan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui telepon, surel, atau media komunikasi lainnya), serta dalam bentuk wawancara kelompok fokus (Creswell, 2010; hal 230-232). Dalam riset ini, periset memiliki beberapa narasumber untuk memperoleh data, diantaranya: Eksekutif Sekretaris Sekretariat Nasional MDGs Periode 2011-2015, Education Specialist, EECAD Cluster, UNICEF Indonesia, Kasubdit Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Subbagian Kebijakan, Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI.

Dalam riset ini, strategi analisis data terbagi ke dalam lima tahapan, yakni pengumpulan data, membaca keseluruhan data, mendeskripsikan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan interpretasi data (Creswell, 2010: 237-245). Validitas data diperoleh periset melalui pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang valid. Sedangkan reliabilitas data dalam riset ini diperoleh melalui penggunaan daftar pustaka atau *bibliography* yang sesuai dengan validitas sebuah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja Sama UNICEF dengan Indonesia dalam Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua sebagai Tujuan Dua MDGs

Dibentuk pada 1946, UNICEF atau *United Nations Children's Fund* berdiri dengan tujuan awal untuk memberikan bantuan kepada anak-anak di negara yang hancur akibat Perang Dunia II. Pasca 1950, organisasi ini kemudian diarahkan kepada upaya program-program umum guna meningkatkan kesejahteraan anak, khususnya di negara-negara berkembang dan yang sedang berada dalam situasi darurat.

Memiliki mandat yang besar terhadap ibu dan anak, hingga saat ini UNICEF hadir untuk membantu upaya nasional dalam menyediakan kesempatan bagi anak-anak dan remaja yang kurang beruntung untuk memaksimalkan potensi mereka dan meningkatkan kesehatan, gizi, kualitas pendidikan, kesetaraan, dan kesejahteraannya. Misinya untuk memberikan dana pada anak-anak guna mendapat kesejahteraan yang lebih luas sebagai salah satu lembaga PBB membuat UNICEF dianugerahi nobel perdamaian pada 1965 (Mingst, 2008).

Aktif di lebih dari 190 negara, UNICEF menggunakan otoritas globalnya untuk

memastikan anak-anak di dunia mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya dan dapat berkembang di lingkungan yang bebas dari bias kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi (UNAIDS, 2015)

UNICEF bekerja untuk *Millenium Development Goals* dan *Sustainable Development Goals* serta kemajuan yang dijanjikan dalam Piagam PBB untuk keadilan dan kesejahteraan anak. UNICEF percaya bahwa untuk membentuk fondasi utama dari perkembangan manusia salah satunya adalah dengan merawat dan mempromosikan hak-hak anak di dunia. Organisasi yang bermarkas di New York ini banyak berkontribusi pada dukungan dan penyediaan layanan kesejahteraan anak, seperti penyediaan dana untuk layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perlindungan hak anak dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah dan swasta.

UNICEF meyakini bahwa pemenuhan hak anak dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk melahirkan semangat dan optimisme baru dari generasi muda yang dapat memicu transformasi sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan peluang-peluang tersebut UNICEF bekerja sama dengan pemerintah negara, badan-badan PBB, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan individu muda sebagai jaringan mitranya.

Bekerja sama dengan Institusi Statistik UNESCO pada 2012, UNICEF meluncurkan *Out-of-School Children Initiative* (OOSCI) atau Inisiatif Anak yang Tidak Bersekolah secara global yang bertujuan untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah di seluruh dunia secara substansial dan berkelanjutan dengan memberikan data yang dapat ditindaklanjuti kepada pemerintah mitra.

Untuk menanggapi permasalahan pendidikan dasar di Indonesia tersebut, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan kualitas dan akses ke pendidikan bagi anak-anak berusia 3-18 tahun, khususnya bagi anak-anak dengan disabilitas dan yang berada di wilayah terpencil

dengan mengacu pada rancangan aksi prioritas masing-masing wilayah. Prioritas utama Indonesia untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah membuat dukungan UNICEF mengarah pada pembuatan bukti berupa penyediaan data, advokasi kebijakan, dan penguatan sistem untuk akses pendidikan yang adil, peningkatan hasil pembelajaran, dan pengembangan keterampilan remaja.

Sejak 2010, UNICEF fokus dalam meneliti dan mengkaji hal-hal yang dianggap menjadi hambatan bagi anak memperoleh akses pendidikan melalui program *Out of School Children Global Initiative* (OOSCI). Sejumlah usaha dalam menangani permasalahan ATS guna mencapai pendidikan dasar untuk semua di Indonesia terangkum dalam beberapa kerja sama yang dilakukan keduanya, antara lain:

a. Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM)

Dalam konteks mencapai pendidikan dasar untuk semua di Indonesia, UNICEF mengusung penguatan data terkait dengan anak tidak sekolah (ATS). Sejak dirilis 2002, UNICEF telah bekerja sama dengan pusat data dan statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM). SIPBM adalah program pengumpulan data dengan responden kepala keluarga yang dilakukan secara sensus oleh anggota masyarakat sekitar dengan tujuan untuk mengetahui jumlah ATS dan dimana saja letak-letak mereka untuk kemudian ditentukan usaha membawa mereka kembali ke sekolah.

Pemerintah sudah memiliki data-data yang cukup komprehensif mengenai anak bersekolah melalui Data Pokok Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *Education Management Information System* di Kementerian Agama, namun pemerintah tidak memiliki data-data yang cukup akurat mengenai anak yang tidak bersekolah. Permasalahan muncul ketika pemerintah menetapkan program wajib belajar 9 tahun untuk anak-

anak usia sekolah dasar, namun kenyataannya masih ada anak-anak yang tidak bersekolah. Untuk menangani masalah tersebut maka dibutuhkan SIPBM sebagai penyedia data mengenai siapa dan dimana saja anak-anak yang tidak bersekolah guna membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, pengalokasian sumber daya, dan menyusun program target.

Dalam hal ini, UNICEF berperan mendampingi kepala dalam menyediakan sistem pemetaan anak tidak sekolah di tingkat masyarakat, penyediaan ahli untuk membantu pengembangan dan evaluasi data, dan advokasi program tindak lanjut sehingga diketahui siapa dan dimana saja anak yang tidak bersekolah untuk kemudian dibantu kembali bersekolah.

UNICEF juga bekerja sama dengan Kemendes PDTT untuk mengintegrasikan SIPBM ini ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Data-data yang ada dari UNICEF mengenai anak tidak sekolah membantu pemerintah desa mengatasi permasalahan ATS di wilayahnya. Artinya, dalam konteks implementasi undang-undang desa, UNICEF membantu mereka dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di bidang pendidikan dasar melalui penyediaan data-data ATS yang riil dan akurat.

Esensi program SIPBM ini adalah kerja sama UNICEF dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah di Indonesia secara khusus, sebagai penyedia data indikator sosial yang akurat untuk perencanaan pembangunan pendidikan dasar. SIPBM diharapkan dapat menjadi data pelengkap bagi data-data lain yang digunakan pemerintah pusat maupun daerah untuk perencanaan pendidikan di wilayah mereka sehingga permasalahan yang ada dapat diatasi secara lebih baik.

b. Perencanaan Pendidikan Berbasis Data

Untuk memastikan agar anak tidak sekolah dapat kembali bersekolah, UNICEF

mendorong pengalokasian sumber daya pemerintah dengan mengembangkan apa yang disebut dengan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data. Jika sebelumnya UNICEF telah mendukung pemerintah agar mereka memiliki data yang akurat terkait dengan anak tidak sekolah, melalui program ini dilakukan penataan mengenai bagaimana data tersebut digunakan sebagai basis untuk membuat perencanaan pendidikan dalam menangani permasalahan anak tidak sekolah yang telah diidentifikasi dari pemetaan berbasis masyarakat sebelumnya dengan melibatkan stakeholder penting sebagai esensinya.

Dalam melakukan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data, UNICEF tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, tapi juga pemerintah desa. Hal ini terkait dengan implementasi undang-undang desa, dimana melalui undang-undang desa ini pemerintah desa tersebut mendapatkan dana yang bisa mereka kelola sendiri dan bisa digunakan untuk pembangunan di desa masing-masing, termasuk di dalamnya untuk pembangunan di sektor pendidikan.

Hal ini kemudian berkenaan dengan bagaimana UNICEF membuka mata pemerintah desa terkait dengan situasi anak tidak sekolah di daerah mereka dan bagaimana kemudian setelahnya mereka mengalokasikan dana dan merencanakan kegiatan atau program yang dapat membantu anak-anak yang tidak sekolah agar kembali bersekolah dengan menggunakan sumber daya dan dana desanya sendiri.

c. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

Dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs, UNICEF juga membantu melakukan pengembangan model pendidikan universal bagi anak-anak di desa. UNICEF mencoba memberikan inovasi-inovasi baru di level desa yang

perlu terus dikembangkan agar semua anak tidak bersekolah yang sudah diidentifikasi melalui pendataan sebelumnya bisa kembali bersekolah dan belajar. Cara paling ideal untuk memastikan anak-anak tersebut dapat kembali bersekolah dapat diupayakan melalui dua jalur, yakni sekolah formal dan sekolah non-formal.

Berdasarkan data susenas yang diolah UNICEF setiap tahunnya, ada sekitar 4 juta anak yang tidak bersekolah di Indonesia. Mereka yang tidak bersekolah ini rata-rata sudah berhenti bersekolah selama 2 atau 3 tahun sehingga mendorong mereka dalam jumlah yang cukup besar untuk kembali ke sekolah formal dirasa sulit. Faktor-faktor psikologi dan beban akademis yang mereka rasakan membuat mereka tidak nyaman untuk kembali bersekolah.

Oleh karena itu, UNICEF menawarkan PKBM sebagai program alternatif yang mendorong mereka untuk kembali belajar dengan waktu yang lebih fleksibel, terutama untuk anak-anak yang sudah bekerja agar bisa bekerja di siang hari kemudian belajar di malam hari di PKBM.

Dengan kata lain, PKBM adalah program kerja sama UNICEF dengan pemerintah Indonesia di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Sosial, yang memfasilitasi proses belajar bagi anak-anak usia sekolah dasar melalui kejar Paket A,B,C dan kelas-kelas tambahan non-formal, seperti kelompok usaha pemuda produktif, kelompok belajar usaha, keaksaraan fungsional dasar dewasa, taman bacaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dengan sistem dan waktu yang lebih fleksibel.

PKBM mencoba untuk menyediakan semacam kursus-kursus atau sanggar kegiatan masyarakat yang bisa dikembangkan sehingga anak-anak tersebut bisa terus mendapatkan pembelajaran dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan minat dan potensi yang ada sebagai esensinya. Harapannya dengan

membiasakan mereka untuk kembali belajar secara perlahan dapat membuat mereka memiliki kembali ketertarikan untuk kembali ke pendidikan formal maupun non-formal agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dan penyetaraan untuk mendapatkan ijazah.

Yang menjadi tantangan PKBM adalah kualitasnya yang kurang memadai dan stigma mengenai perbedaannya dengan sekolah regular sehingga fasilitas pendidikan ini tidak memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi anak-anak yang ingin kembali bersekolah untuk kembali belajar melalui fasilitas ini.

d. Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS)

Dengan kekuatan dan *expertise* yang dimiliki serta ditunjang dengan berbagai hasil studi dan penelitian, UNICEF berupaya bersama-sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengembangkan solusi-solusi yang inovatif yang dianggap bisa lebih efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam bekerja sama dengan Indonesia untuk mencapai pendidikan dasar yang berbasis MDGs, UNICEF memiliki sistem piloting yang tugasnya adalah mengembangkan model-model program kerja sama yang efektif dan *affordable*.

Melalui sistem piloting, UNICEF mencoba membantu mengatasi permasalahan nasional yang ada, dengan tidak hanya menciptakan teori, tetapi juga membuktikan bahwa yang ditawarkan UNICEF efektif dalam menjawab permasalahan yang ada. Sistem piloting yang dilakukan UNICEF bertujuan untuk menyadarkan pemerintah bahwa perlu adanya sistem pemetaan yang dilakukan secara detail di level masyarakat mengenai data permasalahan anak tidak sekolah. Pemetaan yang dilakukan kemudian diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap daerah atau wilayah di Indonesia dalam mencari solusi secara aktif dan mandiri dari

permasalahan yang ada menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Hal tersebut dibuktikan melalui program Stranas ATS yang dimulai pada akhir waktu pelaksanaan MDGs, sebagai perkembangan dari fokus program OOSCI, yang dilakukan di 4 daerah di Indonesia, antara lain Brebes - Jateng, Mamuju - Sulawesi Barat, Bone dan Takalan - Sulawesi Selatan. Bekerja sama dengan Bappenas melalui Direktorat Pendidikan dan Agama, program Stranas ATS UNICEF membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan pemetaan dan analisa mendalam terhadap berbagai macam kebijakan dan program yang ada, yang dianggap dapat berkontribusi dalam penanganan anak tidak sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya, sudah ada 17.000 anak-anak usia pendidikan dasar di 4 wilayah tersebut yang telah kembali bersekolah sejak adanya program kerja sama yang dimulai menjelang berakhirnya MDGs ini.

Dalam meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah dasar, pemerintah Indonesia sudah memiliki banyak program pendidikan dan pengalokasian sumber daya manusia yang luar biasa dalam mendukung peningkatan akses terhadap pendidikan untuk anak-anak yang berada dalam kelompok rentan, seperti anak jalanan, anak pekerja, anak berkebutuhan khusus, dan anak di daerah 3T. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tantangan yang ada di setiap program membuat penanganan anak tidak sekolah belum bisa efektif dan saling melengkapi satu sama lain secara optimal. Oleh karena itu, kehadiran Stranas ATS sebagai dokumen nasional dengan implemmentasi di daerah yang dilengkapi dengan petunjuk teknis sangat membantu dalam melakukan analisa mendalam terhadap suatu program dan kebijakan yang ada.

Nantinya, jika analisa tersebut menghasilkan sesuatu yang bagus dan

bermanfaat, pemerintah pusat maupun daerah dapat mengintegrasikannya dengan sistem yang ada melalui penerbitan kebijakan-kebijakan yang relevan supaya ketika pemerintah pusat maupun daerah ingin melaksanakan program tersebut ada dasar kebijakan yang jelas.

PEMBAHASAN

Sejak UNICEF benar-benar fokus dalam melakukan studi dan mengadvokasi hasil studi ke berbagai pihak, stakeholder, pemerintah dan non-pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, permasalahan anak tidak sekolah dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua semakin mendapat perhatian lebih. Artinya, jika sebelumnya persoalan anak tidak sekolah hanya dianggap sebagai fenomena biasa yang sering terjadi, sejak hadirnya UNICEF dan program kerja samanya di Indonesia, persoalan ini mulai mendapat perhatian yang memadai.

Kerja sama UNICEF dengan Indonesia melalui program SIPBM, PKBM, dan Stranas ATS menunjukkan bahwa isu ATS penting untuk ditangani jika pemerintah ingin mencapai tujuan dua MDGs, yakni mencapai pendidikan dasar untuk semua.

Khusus untuk daerah-daerah yang bekerja sama dengan UNICEF, tercatat sebanyak 17.000 anak telah kembali bersekolah sebagai dari hasil kerja sama UNICEF dengan pemerintah daerah melalui program Stranas ATS di 4 daerah yang menjadi fokus program OOSCI yaitu Brebes - Jateng, Mamuju - Sulawesi Barat, Bone dan Takalan - Sulawesi Selatan.

Program tersebut banyak menghasilkan *good practice* yang lahir dari upaya-upaya yang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, salah satunya adalah penerbitan regulasi oleh Kemendikbud terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat pendidikan, di mana salah satu ketentuannya adalah semua anak usia sekolah dasar harus bersekolah dan pemerintah di tingkat provinsi

maupun kabupaten bertanggung jawab untuk itu.

Selain itu, berdasarkan indikator-indikator MDGs poin kedua juga dapat dilihat adanya peningkatan yang terjadi pada akhir 2015 dibandingkan dengan 2010 sejak MDGs mulai diinternalisasikan secara serius oleh pemerintah Indonesia.

Pada 2015, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tingkat nasional mengalami peningkatan menjadi 96,70 persen dari 88,70 persen pada 1992. indikator proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar juga menunjukkan perubahan yang cukup signifikan sejak 1990. Pada tahun ajaran 2014/2015, presentase angka yang menunjukkan murid kelas I yang berhasil menamatkan SD/MI sudah mencapai 88,94 persen. Kemudian, indikator angka melek huruf penduduk berusia 15-24 tahun pada 2015 sudah berada pada angka tertinggi sejak 1990, yakni sebesar 99,67 persen. Angka ini memang sudah tinggi dan bergerak stabil sejak tahun 1990. Tidak ada perbedaan angka melek huruf yang signifikan antara remaja laki-laki dan perempuan dan antara remaja perkotaan maupun pedesaan.

Proses monitoring kerja sama dilakukan dengan mengacu kepada indikator-indikator yang telah ditetapkan sejak awal yang kemudian menjadi rujukan untuk melihat apakah suatu program tersebut berhasil atau tidak. Ketercapaian indikator diupayakan melalui design kegiatan itu sendiri sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sedemikian rupa pada akhirnya mampu berkontribusi dalam pencapaian indikator-indikator yang ada. Rancangan Aksi Daerah (RAD) yang dimiliki setiap daerah memudahkan UNICEF dalam mengevaluasi dan memonitor pencapaian target melalui indikator-indikator yang ada.

Di samping itu, UNICEF turut melakukan pendokumentasian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian-capaian kepada *good practice* yang ada melalui laporan rutin tahunan yang harus diberikan kepada UNICEF

yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah yang menjadi wilayah kerja sama maupun oleh pihak-pihak yang secara khusus direkrut UNICEF. Lebih besar lagi, mekanisme monitoring juga ditentukan oleh kompleksitas program yang dilakukan. Pengumpulan data yang sangat detail membuat monitoring kegiatan kerja sama UNICEF terbagi ke dalam tiga tahap, yakni *based-line*, *mid-line*, dan *end-line*

Terakhir, dilakukan semacam studi-studi kualitatif untuk melengkapi data yang dihasilkan dari *end-line study*, tergantung dengan apa programnya. Dengan demikian, design monitoring kerja sama yang dilakukan bisa bervariasi, namun pada intinya selalu ada design dan mekanisme yang dibangun sejak awal untuk membantu UNICEF dalam mengukur ketercapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kerja sama dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs antara UNICEF dengan Indonesia dalam pelaksanaannya turut menemui sejumlah hambatan dan tantangan. Kapasitas sumber daya manusia yang ada selalu menjadi salah satu hambatan utama. Setiap daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia yang bervariasi sehingga perlu usaha yang cukup besar dalam penguatan kapasitas untuk memastikan bahwa daerah-daerah tersebut mampu melaksanakan program-program yang ada dan mencapai hasil yang diharapkan.

Selanjutnya, pergantian kepala daerah yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sekali juga dilihat sebagai salah satu tantangan utama dalam program-program kerja sama UNICEF dengan Indonesia. Mutasi di level staff yang cukup sering membuat UNICEF kehilangan *vocal point* yang sudah terlatih ketika bekerja sama dengan Bappeda atau dinas pendidikan provinsi. Terakhir, yang juga menjadi tantangan tersendiri dalam kerja sama antara UNICEF dengan Indonesia dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs adalah kompetisi pendidikan dasar sebagai satu prioritas dengan prioritas-prioritas

wilayah lainnya di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Pemerintah Indonesia sendiri turut merasakan sejumlah hambatan dan tantangan dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua. Sejumlah hambatan dan tantangan tersebut, antara lain (Bappenas, 2010):

1. Meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah
2. Menjangkau anak-anak yang tidak terjangkau, terutama yang disebabkan oleh kemiskinan
3. Meningkatkan kesiapan anak bersekolah (*school readiness*) untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar
4. Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal bagi anak-anak putus sekolah dan yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal di sekolah
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai termasuk buku dan peralatan belajar-mengajar
6. Meningkatkan tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik di seluruh wilayah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
7. Melakukan pengayaan kurikulum pendidikan dasar untuk meningkatkan kualitas siswa yang meliputi *soft skill* dan kecerdasan jamak (*multiple intellegences*)
8. Mengembangkan sistem pembiayaan dan mekanisme transfer yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pembiayaan serta untuk menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan dasar berkualitas

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan dan strategi yang dapat berpengaruh pada penyelesaian permasalahan

pencapaian pendidikan dasar untuk semua, antara lain (Bappenas, 2010):

1. Meningkatkan Pemerataan Akses
 - a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada tingkat nasional dan daerah untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana belajar-mengajar yang memadai, terutama di daerah-daerah miskin, terpencil dan tertinggal, termasuk madrasah dan pesantren
 - b) Memastikan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan pro-masyarakat miskin untuk lebih menjamin terwujudnya pembiayaan pendidikan yang adil
 - c) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program BOS
 - d) Mempercepat dan memperluas layanan PAUD yang holistik dan terintegrasi terutama di daerah pedesaan atau di daerah tertinggal
 - e) Meningkatkan program kesetaraan yang bermutu melalui program pendidikan Paket A, B, C serta keterampilan non-formal
2. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi
 - a) Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru
 - b) Perbaiki kurikulum dan kualitas belajar-mengajar
 - c) Meningkatkan pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) bagi para kepala sekolah dan pengawas
3. Memperkuat Tatakelola dan Akuntabilitas
 - a) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pendidikan dasar
 - b) Meningkatkan akuntabilitas manajemen sumberdaya pendidikan
 - c) Meningkatkan partisipasi masyarakat

KESIMPULAN

Millenium Development Goals memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap kemajuan

pendidikan dasar di Indonesia. MDGs berhasil mereview dan memberikan pengayaan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada serta mendorong pemerintah untuk mengupayakan hal-hal yang belum maksimal dan perlu diperkuat. MDGs pun turut mendorong internalisasi tujuan-tujuan global yang ada ke dalam dokumen perencanaan nasional sejak 2010.

Komitmen untuk menyukseskan tujuan dua MDGs, yakni mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target utama menjamin semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan, di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar pada 2015, guna meningkatkan kualitas hidup manusianya agar dapat berkontribusi secara menyeluruh dalam rangkaian pembangunan nasional terangkum dalam dokumen RPJPN, RPJMN, RPJMD, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang menyusun Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Indonesia antara 2010-2015 dan 33 Rencana Aksi Daerah oleh pemerintah daerah.

Dalam mendukung tercapainya pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs di Indonesia, UNICEF hadir sebagai salah satu lembaga PBB yang memiliki mandat kuat terhadap anak yang bertugas dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar anak serta memastikan agar setiap anak dapat memperoleh haknya, khususnya pendidikan dasar. Komitmen tersebut mendorong UNICEF dalam membantu ketercapaian pendidikan dasar di Indonesia melalui sejumlah kerja sama yang dilakukan di antara keduanya. Fokus UNICEF dalam penanganan isu anak tidak sekolah guna mencapai pendidikan dasar untuk semua membuat kerja sama yang dilakukan dengan Indonesia mengerucut pada bentuk penyediaan data dan penggunaan data itu sendiri, advokasi dan analisa program dan kebijakan, serta penguatan sistem untuk akses pendidikan yang lebih merata.

Meskipun belum mencapai angka maksimal pada indikator pendidikan dasar dan masih adanya sejumlah hambatan dan tantangan yang ditemui dalam pelaksanaannya, UNICEF berhasil mengadvokasi pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, untuk lebih memperhatikan isu anak tidak sekolah guna mencapai pendidikan dasar untuk semua. Hal tersebut dibuktikan dengan sebanyak 17.000 anak yang terhitung telah kembali bersekolah di daerah-daerah yang bekerja sama dengan UNICEF pada akhir 2015.

UNICEF juga telah berhasil melakukan proses monitoring dan evaluasi ketercapaian yang dibuktikan dengan adanya peningkatan pada angka indikator pendidikan dasar sejak 2010 hingga 2015. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama UNICEF dengan Indonesia dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs belum dapat dikatakan 100 persen berhasil, namun hal tersebut telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi dunia pendidikan dasar dan anak usia sekolah di Indonesia.

Periset menyarankan untuk mengadakan riset lebih lanjut dan penelusuran secara mendalam mengenai kerja sama UNICEF dengan Indonesia dalam mengembangkan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas setara dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, berdasarkan tujuan keempat kerangka pembangunan global terbaru pasca 2015, *Sustainable Development Goals* (SDGs). Periset menyarankan adanya riset lanjutan yang dapat menghasilkan rekomendasi terbaru perihal kerja sama UNICEF dengan Indonesia di bidang pendidikan dengan lingkup yang lebih luas guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Periset menyarankan untuk mengadakan riset lebih lanjut dan penelusuran secara mendalam mengenai kerja sama UNICEF dengan Indonesia dalam mengembangkan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas setara dan mendukung kesempatan belajar

seumur hidup bagi semua, berdasarkan tujuan keempat kerangka pembangunan global terbaru pasca 2015, *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Periset menyarankan adanya riset lanjutan yang dapat menghasilkan rekomendasi terbaru perihal kerja sama UNICEF dengan Indonesia di bidang pendidikan dengan lingkup yang lebih luas guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). *International Organisations* (3rd ed.). London: Routledge.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Fukuda-Parr, S. (2011). *Theory and Policy in International Development: Human Development and Capability Approach and the Millennium Development Goals*. *International Studies Review*, [online] 13(1), pp.122-132. Available at: https://www.jstor.org/stable/23016146?readnow=1&seq=9#metadata_info_tab_contents [Accessed 3 Sep. 2019].
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2010). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia 2010*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2013). *Serial Pedoman Teknis: Pedoman Pemberian Insentif Bagi Daerah Untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Provinsi*. [pdf] Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Available at: [http://perpustakaan.bappenas.go.id/longtar/file?file=digital/153706-\[_Konten_-\]Konten%20D498.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/longtar/file?file=digital/153706-[_Konten_-]Konten%20D498.pdf) [Accessed 15 Jun. 2019].

- Mingst, K. (2008). UNICEF International Organization. In *Encyclopedia Britannica*. Encyclopedia Britannica.
- Sumner, A., & Tribe, M. (2008). *International development studies*. London: SAGE.
- UNAIDS. (2015). Retrieved 10 December 2019, from https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNICEF_en.pdf
- UNICEF - Millennium Development Goals. (n.d). Retrieved 10 December 2019, from https://static.unicef.org/mdg/index_aboutthegoals.htm
- UNICEF - What we do. (n.d). Retrieved 10 December 2019, from <https://www.unicef.org/indonesia/what-we-do>
- Weiss, T., & Wilkinson, R. (2014). *International organization and global governance*. London: Routledge.
- Zartman, I., & Touval, S. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. New York: Cambridge University Press.

BIOGRAFI

Ellissa Priyanka adalah seorang penstudi Hubungan Internasional yang berfokus pada studi kerja sama pembangunan internasional dari Universitas Padjadjaran

Dudy Heryadi adalah seorang pengajar dan penggiat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran